

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

(DISPENDA) KABUPATEN KAMPAR

A. Gambar Umum wilayah Kabupaten Kampar

Letak Kabupaten kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua Kabupaten atau Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan jalur lalu lintas Barat yang menghubungkan beberapa Kota di Sumatera dan juga berada dikawasan segitiga, pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kaluasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailan (IMT-GT).

B. Tinjauan Historis

Secara historis Kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/6M/STE/49 tanggal 9 November 1949. Ibu Kota Kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru dengan wilayah Pemerintahan Daerah-Daerah bekas kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1956 Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan Ke Bangkinang dan baru terlaksana Tanggal 6 Juni 1967.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar Ke Bangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.

2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi Madya.
3. Mengingat luasnya Daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan ke Bangkinang guna mengingat Efisiensi pengurusan Pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari pekanbaru.
5. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah Kecamatan dan sebaliknya. Kemudian sejalan dengan diberlakukannya Reformasi Politik yang dilandasi oleh semangat Demokrasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor.53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah Pemerintahan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 9(sembilan) kecamatan dengan luas 3650 km² yaitu Salo, Seberang, Batu Bela, Kumantan, Cit jitiro, Letnan Boyak, Candika, Agus Salim.

C. Kondisi Geografis

Kampar memiliki luas 10.983.46 km² yang wilayahnya berada pada posisi 1 25LU.20LS dan 100 42 dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebelah barat dengan provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah timur dengan Kota pekanbaru dan kabupaten pelalawan.

Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari wilayah perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar kabupaten kampar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan provinsi sumatera barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Di samping itu sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu sungai kampar dan sungai siak. Sungai kampar panjang nya lebih kurang 413.5 km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 143 meter.

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten kampar yang meliputi kecamatan XIII Koto kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, siak hulu dan kampar kiri. Kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung.

Sungai-Sungai besar yang terdapat di kabupaten kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Prasarana perhubungan, dan sumber air bersih budi daya ikan. Kabupaten kampar padaumumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 32.

D. Sejarah Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kampar

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 2011 – 2016, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu unit

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.¹

Visi, misi dan proram Kepala Daerah terpilih selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kampar Tahun 2012 - 2016 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Penyusunannya sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2005–2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun Administrasi dan Pengelolaan keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan

¹ Ibu.Lathifah Birron M, A.Md (Pegawai Dispenda Kab.Kampar), *wawancara*, Senen 14 Desember 2013

masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dengan Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang merubah dan juga menambah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA), yang bermuara pada harus di revisinya Rencana Startegis yang sudah disusun sebelumnya.

Dalam Revisi RENSTRA ini juga akan memuat perubahan Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan menjadi pedoman dan acuan DPPKA sampai dengan tahun 2016.

Sejalan dengan Perubahan kewenangan dan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi Misi, Target dan sasaran SKPD maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya ekstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tuntutan

peningkatan PAD, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal, Profesional dan Akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah sehingga DPPKA harus lebih berbenah dari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembankan pada masa-masa yang akan datang.

Dengan memiliki acuan kerja yang jelas dan terukur, berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan yang disusun DPPKA yakni Revisi RENSTRA Tahun 2012-2016, disusun berdasarkan skala prioritas yang tujuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang diwujudkan melalui 5 (Lima) Pilar Pembangunan yang bermuara kepada zero kemiskinan, zero pengangguran dan rumah-rumah kumuh.

1. VISI dan MISI

1.1 VISI

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu kepada Visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi

induk organisasinya, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proporsional serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional Tahun 2016”

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan dan Aset yang profesional.

Kapasitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelola Keuangan dan Aset secara profesional.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan jumlah yang sesuai dengan potensinya dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset. Untuk itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar beserta seluruh

aparaturnya harus memiliki integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pemungutan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sistem informasi Teknologi Informasi.

1.2 MISI

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Yaitu melalui Tiga Misi Sebagai berikut

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas

Misi Kedua : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan

1.2.1 Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas

Dalam Rangka Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Dengan didukung SDM Berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

SDM merupakan faktor kedua kunci sukses (Key Success) dalam optimalisasi pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset. Potensi Pendapatan Daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik, begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan Aset, tanpa SDM yang baik akan menimbulkan potensi-potensi yang akan merugikan keuangan daerah.

SDM yang memiliki kapasitas dalam mengelola pendapatan, Keuangan dan aset mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas. Kapabilitas merupakan hal yang sangat

penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi, perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga harus siap menambah wawasan dan kemampuan teknisnya. Kemampuan itu pun perlu didukung dengan disiplin, kemampuan perencanaan yang baik, taat kepada penjadwalan tugas yang telah diatur dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada mutu hasil pekerjaannya.

1.2.2 Misi Kedua : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah, sejauh ini kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sosialisasi dan propaganda lainnya mengenai arti penting pajak daerah dan retribusi daerah

akan selalu dikembangkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

1.2.3 Misi Ketiga: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan

Pengelolaan keuangan dan Aset daerah sangat tergantung pada Kemampuan SDM, serta sarana dan prasana, mulai dari tahap Perencanaan, Penggunaan, Monitoring yang bermuara pada Data dan Informasi yang akurat dan Akuntabel. Dari hal diatas Pengelolaan keuangan dan Aset akan di tingkatkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga setiap tahap dalam pengelolaan keuangan dan aset akan lebih efektif dan efisien.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar.²

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari:

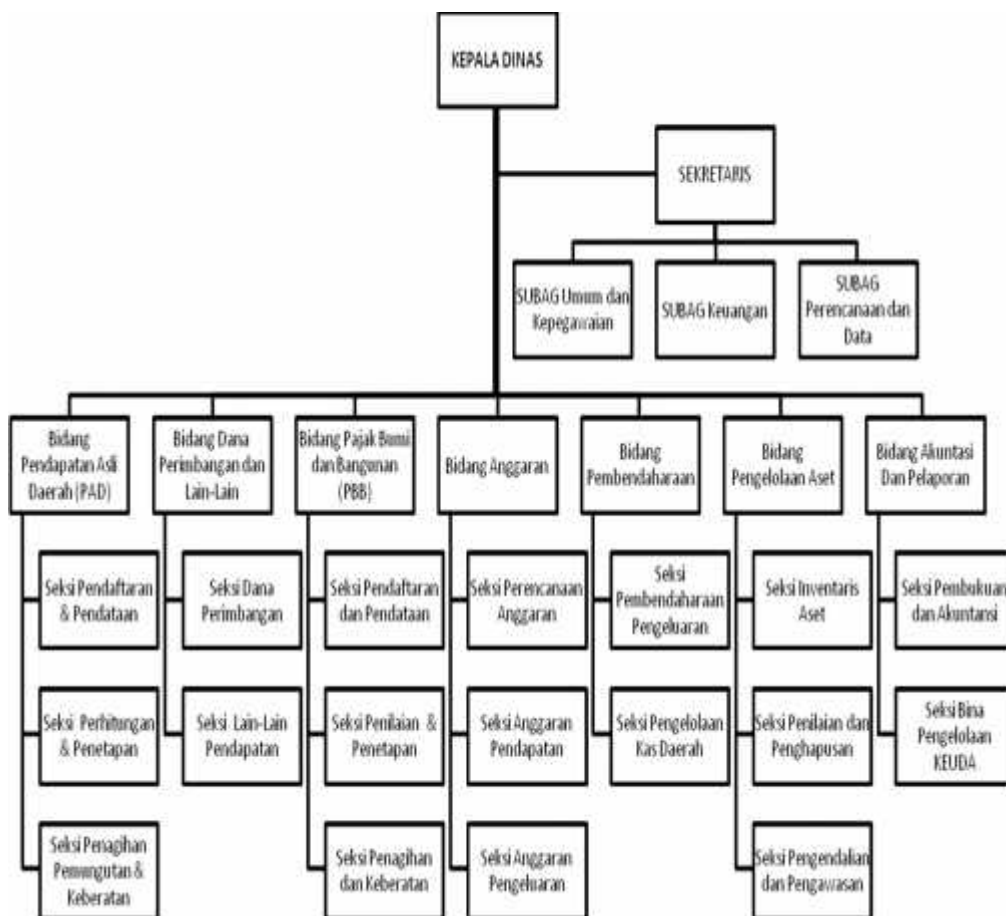
- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Data;
- 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD);

²Bapak.Riki Pratama (kasi Penilaian dan Pengapusan Bid.Pengelolaan Aset), wawancara, 14 Desember 2013

- a) Seksi Pendaftaran & Pendataan;
 - b) Seksi Perhitungan & Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan Pemungutan & Keberatan;
- 4) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain ;
- a) Seksi Dana Perimbangan;
 - b) Seksi Lain-Lain Pendapatan;
- 5) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Seksi Penilaian & Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan dan Keberatan.
- 6) Bidang Anggaran
- a) Seksi Perencanaan Anggaran
 - b) Seksi Anggaran Pendapatan
 - c) Seksi Anggaran Pengeluaran
- 7) Bidang Pembendaharaan
- a) Seksi Pembendaharaan Pengeluaran
 - b) Seksi Pengelolaan Kas Daerah
- 8) Bidang Pengelolaan Aset
- a) Seksi Inventaris Aset
 - b) Seksi Penilaian dan Penghapusan
 - c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- 9) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- a) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - b) Seksi Pembukuan dan Akuntansi
 - c) Seksi Bina Pengelolaan KEUDA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Berdasar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Sususna
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.



Sumber: Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Kampar

2.1 Tugas Pokok

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan, dan aset daerah memiliki Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, dengan Rincian Tugas pokok sebagai berikut:

1. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
2. Menkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran.
5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang ketatausahaan, pendapatan, keuangan, aset, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

7. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan pengelolaan keuangan serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2.2 Fungsi

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja DPPKA Kabupaten Kampar

Sistem Prosedur Dan Mekanisme yang menjadi dasar Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di DPPKA Kampar adalah sebagai Berikut:

2.3 Sumber Daya SKPD

2.3.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2013 sebanyak 70 orang yang terdiri dari :

1. Golongan IV : 5 orang
2. Golongan III : 50 orang
3. Golongan II : 15 orang

Selain PNS, pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Kampar juga terdapat tenaga honorer sebanyak 6 orang

Formasi dan pengisian pegawai dapat dilihat melalui tabel berikut :